

**PERAN BADAN KEATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BENGKALIS DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK YANG
CERDAS DAN BERINTEGRITAS TAHUN 2018**

Oleh: Iko Deswanda

e-mail : ikodeswanda223@gmail.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP., M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

To realize smart political participation and have Body integrity to Unity of Nation and Politics have to play its role as government agency to be target of which is dreamed of is immediately reached. Role represent attitude consciously which must be taken by governance institution to reach for especial target, policy, and or actions into related/relevant inwroughtly. Formula of is Problem of the taken is How Effort Body Unity of Nation and Politics Sub-Province of Bengkalis In Realizing Smart Participation and have Integrity to year 2018 and What becoming factor resistor of Body Unity of Nation and Politics Sub-Province of Bengkalis In Realizing Smart Participation and have Integrity to year 2018.

Intention of this first research for the mendeskripsikan of Role Of Body Unity of Nation and Politics Sub-Province of Bengkalis in realizing Smart Political participation and have Integrity to year 2018. Secondly to know factors pursuing Political participation storey;level exist in Sub-Province of Bengkalis. Method Research the used is Research Qualitative. this Descriptive Type Research Qualitative. this Location Research in Body Unity of Nation and Politics Sub-Province of Bengkalis. Technique data collecting by Observation, Interview, bibliography study and of study documentation. Technique analyse data by data discount, presentation of data verification and data.

Result of from research show it him to realize smart participation and have integrity to use poin beberarapa Role of Government of public road which must by Body Unity of Nation and Politics Sub-Province of Bengkalis. Governmental Perann as Exponent of yaiu by running to shar workplan which have been specified by Body Unity of Nation and Politics like: Monitoring General election of Governor of Riau and Socialization To Society at General election of Governor of Riau and Role of Government as executor alone by resource mengoptimalisasi like Human Resource, Resource of Finansial and facilities and basic facilities. For the factor of resistor in realizing smart political participation and have integrity to is the limited resource and various factor of eksternal itself kesbangpol is geographical position separated by island, cultural of politics exist in Bengkalis kabpaten, difference each;every district, economic factor and storey;level education of society.

Keyword: Role Of Government, Political Participation, Smart and have Integrity.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Partisipasi menjadi pilar utama dalam menjunjung demokrasi disuatu negara, baik dari masyarakatnya maupun dari *stakeholder* nya. Peran masyarakat dalam negara demokrasi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan negara. Negara yang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang aktif serta kritis terhadap negara merupakan salah satu contoh hidupnya demokrasi dinegara tersebut. Sedangkan pada tahap konsolidasi, masyarakat dianggap berperan dalam upaya pembentukan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab kepada rakyat (*good governance*) serta upaya untuk memastikan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya aturan main yang berlaku (*the only game in town*).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Visi yaitu “*Terwujudnya Kesatuan Bangsa yang Kokoh dan Sitem Politik Demokratis yang kondusif di Kabupaten Bengkalis*”. Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan dalam beberapa Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional masyarakat.

Penjelasan : Mewujudkan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui sosialisasi revitalisasi nilai luhur Pancasila sebagai dasar Negara, falsafah Negara, kepribadian, pandangan hidup dan dasar pemersatu bangsa dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional guna memperkuat watak dan karakter masyarakat guna pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dan menumbuhkan kembangkan nasionalisme, cinta tanah air Indonesia, persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta senantiasa waspada terhadap berbagai gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mewujudkan Keserasian Penanganan konflik dan ketahanan Masyarakat.

Penjelasan : Mewujudkan keserasian penanganan konflik dan ketahanan masyarakat melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam rangka menciptakan kondisi suasana yang kondusif aman, damai, sejuk, menangani potensi konflik yang timbul sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki ketahanan di bidang seni, budaya, Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi melalui sosialisasi.

3. Mewujudkan partisipasi politik yang cerdas dan berintegritas

Penjelasan : Mewujudkan partisipasi politik yang cerdas dan berintegritas dimaksudkan melalui sosialisasi peraturan perundangan Pemilu, koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, jujur, adil, bebas, rahasia, lancar, kondusif, aman, damai dan sejuk serta partisipasi aktif masyarakat.

Dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut Badan Kesatuan bangsa dan Politik sudah menetapkan target yang harus di capai dalam setiap tahunnya. Target tersebut sudah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RenStra) yang berlaku kurun waktu 5 tahun.

Untuk mewujudkan partisipasi Politik yang Cerdas dan berintegritas berdasarkan RenStra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 sudah ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi di daerah. Sasaran dari tujuannya adalah meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat dengan semakin bijaknya masyarakat dalam menggunakan hak politik dan hak sipilnya.

Setelah dibentuk Rencana Strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus membuat Rencana Kerja Pemerintah dalam jangka waktu berlaku satu tahun. Rencana Kerja Pemerinrah terseut berisi tentang acuan kegaitan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Rencana program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan Partisipasi Politik yang cerdas dan berintegritas adalah Program Pendidikan Politik Masyarakat. Dari program pendidikan tersebut dibagi lagi beberapa program untuk menyukseskan Pendidikan Politik Masyarakat tersebut, diantaranya:

1. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan politik masyarakat.
2. Rapat dan koordinasi tim verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik.
3. Sosialisasi Undang-Undang partai politik.
4. Sosialisasi bantuan partai politik.
5. Monitoring Pemilu Gubernur Riau.
6. Sosialisasi kepada masyarakat pada Pemilu Gubernur Riau.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sudah menetapkan Indikator peningkatan jumlah pemilih dalam 6 tahun, yaitu di mulai dari tahun 2016 sampai 2021. Di tahun 2016 capaian peningkatan jumlah pemilih adalah 79%, di tahun 2017 yaitu 80%, di tahun 2018 yaitu 83%, di tahun 2019 yaitu 84%, di tahun 2020 yaitu 85%, di tahun 2021 yaitu 86%.

Dengan adanya indikator yang sudah diterapkan diharapkan mampu menjaga stabilitas perpolitikan yang ada di kabupaten bengkalis. Bukan hanya itu saja, diharapkan setelah program itu dilaksanakan dengan baik, masyarakat mampu berpartisipasi dengan baik. Selain itu juga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus mempunyai strategi yang sangat matang. Menurut Swastha, strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah Instansi harus beroperasi untuk mencapai tujuannya.

Untuk mewujudkan partisipasi yang cerdas dan berintegritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat setiap tahunnya. Sesuai yang telah dimuat dalam media Halloraiu.com bahwasannya badan kesatuan bangsa da politik telah melakukan sosialisasi pada 8 kecamatan yang ditujuakan kepada masyarakat maupun partai politik. Namun ditahun 2018 tidak dilaksanakan lagi karena keterbatasan anggaran.

Pada tahun 2018 terdapat pelaksanaan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah tingkat satu. Namun partisipasinya belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Bahkan pada pemilihan Gubernur hanya mencapai 54,41% sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan.

Rendahnya partisipasi politik menandakan masih belum maksimalnya dalam melaksanakan misi yang ketiga tersebut. salah satu faktornya adalah tidak dilaksanakan pendidikan politik pada tahun 2018. Fenomena seperti ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi *stakeholder*. Mereka harus membenahi diri

mereka serta kelembagaan dan organisasi politik yang ada agar lebih masif lagi mensosialisasikan berbagai jenis program yang sudah dibuat. Terutama kaum elite yang berada ditingkat satu dan tingkat dua.

B. Rumusan Masalah

Dari fenomena tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang cerdas dan berintegritas ditahun 2018?
2. Apa yang Menjadi Faktor penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mewujudkan Partisipasi yang cerdas dan berinterigas ditahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegritas tahun 2018
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam mewujudkan partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegritas tahun 2018

D. Kerangka Teori

1. Teori Peran Pemerintah

Peran Menurut Sondang P. Siagian, ada lima Peran dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan sendiri, berikut penjelasannya :

1. Pemerintah sebagai stabilisator

Peran Pemerintah dalam bidang politik ialah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Rongrongan politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa pertentangan yang tidak henti-hentinya

antara berbagai kekuatan politik, apalagi kalau didasarkan pada perbedaan-perbedaan ideologi yang tajam. Bentuk lain dapat berupa timbulnya kekuatan oposisi yang hanya mementingkan partainya sendiri, meskipun hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat.rongrongan yang bersumber dari dalam negeri dapat pula berupa keinginan dan tindakan kelompok ekstra tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan “peraturan permainan politik” yang telah disepakati bersama.

2. Pemerintah sebagai innovator

Inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting, cara berpikir baru. Dengan demikian, dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru.

3. Pemerintah sebagai modernisator

Setiap negara mempunyai tujuan agar seluruh aspek dalam kehidupannya selalu dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk mewujudkannya diperlukan pembangunan yang sistematis, pragmatis dan berkelanjutan. Pemerintahlah yang bertugas untuk “menggiring” masyarakat kearah kehidupan yang modern.

4. Pemerintah sebagai pelopor

Pemerintah harus bersikap sebagai pelopor dari berbagai aspek kehidupan bernegaranya, menjadi panutan bagi seluruh masyarakatnya. Dengan menjadi role model bagi masyarakatnya, pemerintah menjadikan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga ditiru oleh masyarakatnya yang berdampak pada kelancaran pembangunan nasional. Dengan kata lain, selaku pelopor, aparat pemerintah harus menjadi panutan “role model” bagi seluruh masyarakat.

5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri

Pembangunan memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah

sendiri, namun juga menjadi tanggung jawab nasional. Akan tetapi, dengan berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Cerdas dan Berintegritas tahun 2018

Partisipasi politik yang merupakan pengikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang telah dibuat pemerintah. Namun setelah ditetapkan pemilihan langsung, banyak oknum yang ingin merusak citra pemilihan dengan berbagai cara, salah satunya *Money Politic*. Walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Namun masih banyak pelaku yang berani melanggar dengan cara sembunyi-sembunyi.

Melihat kejadian ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis membuat terobosan baru untuk lima tahun kedepannya yaitu dengan membuat misi mewujudkan partisipasi politik yang cerdas dan berintegritas. Misi tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi dibelakangan ini.

1. Peran Pemerintah Sebagai Pelopora. a. Optimalisasi Program Kerja

Tabel 2.1 : Program Kerja Tahun 2018

No	Nama Program	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan Politik masyarakat		V
2	Rapat dan koordinasi tim verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik	V	
3	Sosialisasi Undang-Undang Partai politik		V
4	Sosialisai Bantuan partai Politik		V
5	Monitoring Pemilu Gubernur Riau	V	
6	Sosialisasi Kepada Masyarakat pada Pemilu Gubernur Riau	V	

Sumber: Data Olahan Penulis

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasannya pada tahun 2018 tidak semua program kerja dilaksanakan. Program yang

terlaksana hanya tiga program dari enam program. Program yang tidak terlaksana tersebut salah satunya adalah program utama dalam mewujudkan Misi tersebut yaitu program Penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan Politik masyarakat.

Tiga program yang terlaksana tersebut tidak semuanya menyangkut langsung dengan Masyarakat. Program yang langsung berkenaan dengan peningkatan partisipasi politik yang cerdas dan berintegritas adalah Monitoring Pemilu Gubernur Riau dan Sosialisasi Kepada Masyarakat pada Pilkada Gubernur Riau. Untuk itu penulis akan menguraikan satu persatu program yang terlaksana yang berkaitan langsung dengan Misi terwujudnya partisipasi politik yang cerdas dan berintegritas.

2. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana Sendiri

a. Penguatan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia (ASN dan Honorer)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis didukung oleh 40 orang Pegawai terdiri dari 37 orang PNS, 2 orang non PNS (K2) dan 1 orang Tenaga Akuntansi. Dari jumlah Sumber Daya Manusia yang sebanyak 40 orang tersebut masih belum mampu menjalankan berbagai program yang sudah ditetapkan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan banyaknya program yang harus dijalankan. Selain itu juga hanya terdapat beberapa orang saja yang mampu dan menguasai untuk melaksanakan program tersebut. Namun dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang belum memadai secara kuantitas.

2. Sumber Daya Finansial

Tabel 2.2 Rincian Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Pada Program Pendidikan Politik Masyarakat

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			Keuangan (Rp)	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	420.920.300	373.938.900	88,84	100
1	Rapat dan Koordinasi Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	58.751.600	58.401.600	99,40	100
2	Monitoring Pemliu Gubernur Riau	111.131.300	66.766.300	60,08	100
3	Sosialisasi kepada masyarakat pada Pemilu Gubernur Riau	251.037.400	248.771.000	99,10	100

Sumber: LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018

Uraian Anggaran diatas menunjukkan bahwa anggaran yang berkaitan dengan Misi Mewujudkan Partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegritas belum mampu direalisasikan semaksimal mungkin karena hanya menyentuh angka realisasi 88,84%, hanya terdapat dua program yang memaksimalkan anggaran yang sudah ditargetkan.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mencapai sebuah tujuan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dan lengkap bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Badan Kesatuan bangsa dan Politik sudah mempunyai sarana dan prasarana yang baik. Walaupun masih ada kekurangan beberapa barang, namun pihak Badan sendiri sudah bisa memaksimalkan barang yang ada untuk menjalankan program kegiatan.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Cerdas dan Berintegritas

1. Faktor Penghambat Internal

a. Terbatasnya sumber daya personil yang memiliki keahlian.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya memiliki Sumber daya Manusia sebanyak 40 orang. Dari 40 tersebut hanya terdapat 2 orang tenaga ahli dibidang akuntan, sedangkan untuk bidang lainnya hanya ada beberapa staf yang mendampingi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berharap ada pegawai tambahan yang mumpuni dalam bidang yang ada. Bukan hanya yang sudah mempunyai banyak pengalaman, namun harus mampu mengkonsepkan strategi maupun program untuk kemajuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kedepannya.

Jika dilihat dari Pendidikan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, masih

ada pegawai yang hanya menempuh pendidikan SMP sederajat dan masih banyak yang tamat SMA sederajat. Seharusnya badan Kesatuan Bangsa mengajukan penambahan pegawai yang minimal tamatan sarjana dengan jurusan yang sesuai dengan bidang yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut ini adalah daftar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pendidikan yang ditempuh.

b. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya Kabupaten Bengkalis semenisasi jalan belum sampai menyentuh kedaerah terpencil. Jikapun sudah ada, saat ini masih ada jalan-jalan yang rusak karena termakan usia. Selain itu, masih ada akses jalan yang masih tahap pengerasan. Hal inilah yang dikelukan oleh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pihak Badan sendiri belum mempunyai kendaraan khusus untuk menempuh medan tersebut.

c. Belum optimalnya alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Bengkalis.

Penerimaan anggaran masih kecil dari pada anggaran yang diajukan oleh pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan minimnya dana yang diterima oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik banyak menanggukhan kegiatan yang sudah direncanakan. Apalagi tahun 2018 adalah tahun politik bagi daerah Kabupaten Bengkalis. Seharusnya dana yang dikeluarkan harus maksimal demilancarnya kegiatan. Karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Insansi pemerintahan yang berperan sentral untuk memberi pemahaman terhadap politik kepada Masyarakat.

2. Faktor Penghambat Ekaternal

a. Faktor Geografis dan demografis

Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bengkalis tidak berada disatu pulau yang utuh, melainkan terpisah-pisah. Tentunya akan menyulitkan dan memakan biaya yang cukup besar apabila harus membuat program kegiatan.

b. Faktor Budaya Politik yang ada di Kabupaten Bengkalis

Di Kabupaten Bengkalis sendiri, Masyarakat yang mempunyai budaya politik tipe partisipan masih sangat rendah. Mereka masih banyak banyak melihat keuntungan dalam jangka pendek. Karena kebanyakan masyarakat berpikiran bahwasannya walaupun pemimpin sudah berganti, namun masyarakat tersebut tidak merasakan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

c. Kesenjangan dan kecemburuan antar Kecamatan

Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu merupakan kecamatan yang terluas yaitu 1.946,41 km² (23,16%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Rupert Utara dengan luas 424,59 km² (5,05%). Jarak terjauh antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bathin Solapan yaitu Desa Sebangar dengan jarak lurus 106 km. Dan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bantan, yaitu desa Selat Baru, dan ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 km.

Selain setiap daerah yang mempunyai daerah yang luas dan jarak kepusat ibukota Kabupaten Bengkalis yang jauh, masih banyak sarana seperti jalan yang masih sangat buruk. Seperti gambar dibawah ini yang menunjukkan beberapa kondisi jalan yang ada di beberapa tempat.

d. Angka Kemiskinan dan tingkat pendidikan

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 566.228 jiwa yang terdiri atas 290.382 jiwa penduduk laki-laki dan 275.846 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang tergolong ramai tersebut, tentunya sangat mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan penduduk yang lebih dari setengah juta tersebut tentunya tidak semua mempunyai keadaan ekonomi yang baik. Masih banyak yang dari mereka yang berstatus miskin.

PENUTUPAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah melakukan berbagai upaya dengan menjalankan perannya sebagai instansi pemerintahan. Maka kesimpulan mengenai Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Cerdas dan Berintegritas Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Selaku Pelopor.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan bergerak masif untuk menjalankan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan. Program yang terealisasi tersebut diantaranya:

1. Monitoring Pemilu Gubernur Riau
2. Sosialisasi Kepada Masyarakat Pada Pemilu Gubernur Riau

1. Peran Pemerintah Selaku Pelaksana Sendiri

Peran sebagai pelaksana sendiri adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik. Sumber daya tersebut adalah Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial, sarana dan prasarana. Walaupun sumber daya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dinilai masih kurang mumpuni, namun Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memaksimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat sangat banyak, baik dari internal maupun eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Faktor penghambat internal tersebut diantaranya:

1. Terbatasnya sumber daya yang memiliki keahlian dibidang tertentu.
2. Minimnya sarana dan prasarana.
3. Belum optimalnya penyerapan anggaran.

Faktor Eksternal, Yang terdiri dari Faktor geografis dan demografis dan Letak Bengkulu yang bersebelahan langsung dengan Malaysia, Budaya Politik yang berada di Kabupaten Bengkulu, Kecemburuan yang ada disetiap Kecamatan dan faktor ekonomi dan tingkat pendidikan.

2. Saran

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka saran yang akan diberikan sebagai rekomendasi dari peneliti adalah:

1. Diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan *Open Recruitment* untuk tenaga ahli dibidang yang sudah ada. Hal ini diperlukan untuk membantu dan mempermudah kinerja dan melaksanakan Program kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri, sehingga program kegiatan yang sudah direncanakan perbidang bisa dilaksanakan dengan maksimal. *Open Recruitment* yang ditawarkan adalah dengan mengguakan *Merit System*. Sistem ini dinilai cukup ampuh, karena merekrut manusia sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
2. Diharapkan juga untuk menambah sarana dan prasarana penunjang untuk

melaksanakan berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah pedalaman. Hal ini tentunya untuk efisiensi waktu dan anggaran serta maksimal dalam bertugas.

3. Dalam pembuatan Program kegiatan, gunakanlah *Management Teory*. Dengan menerapkan teori manajemen tersebut, semua program bisa disusun dengan rapi dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan teori ini, bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk dalam menjalankan program kegiatan. selain itu, untuk program kegiatan, setiap tahunnya munculkan program unggulan dengan inovasi yang berbeda sebagai daya tarik masyarakat.
4. Bentuklah e-forum, saat ini akun sosial media sudah banyak dimiliki oleh masyarakat Bengkulu. Dengan e-forum tersebut, bisa memudahkan untuk menyampaikan berbagai masukan untuk masyarakat Bengkulu. Dengan e-forum tersebut, bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang ingin berkontribusi namun kesehariannya disibukkan dengan bekerja.
5. Buatlah strategi khusus di setiap tahunnya, karena satu strategi belum tentu bisa digunakan ditahun berikutnya. Hal ini dikarenakan kita tidak pernah tahu kejadian-kejadian yang ada dimasa depan. Perkembangan teknologi dan berbagai temuan baru diberbagai bidang yang tentunya akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Selain itu, sifat manusia yang mudah jenih dengan pola yang sama harus menjadi perhitungan juga.
6. Libatkan Mahasiswa dan akademisi dalam berbagai kegaitan yang dibuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai *role model* sebagai kaum terdidik. Dengan memilih pemuda yang berprestasi dibidang akademis, tentunya akan membuka cakrawala berpikir masyarakat. Selain itu, dengan keterlibatan mahasiswa dan akademisi lebih memudahkan untuk

menarik kaum muda untuk ikut berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anwar, Khairul. Zainal Abidin. 2017. *Partisipasi Sosial dan Politik Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Unri Press.

Budiardjo, Miriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Djafar, TB. Massa. 2015. *Krisis Politik & Proporsi Demokratisasi: perubahan politik orde baru ke reformasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fahrimal, Yudhi. Muffaruddin. *Political Voluntarism Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat*.

Fuad, Anis dan Kandung Spto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hadiwinata, Bob Sugeng. Christoph Schuck. 2010. *Demokrasi di Indonesia Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Handoyo, Eko. Puji Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon cahaya.

Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

J. Salusu. 2004. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Neoprofit*. Jakarta: PT Grasindo Widiasarana Indonesia.

Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi, Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?*. Jakarta: Erlangga.

Labolo, Muhadam. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Miaz, Yalvema. 2012. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Pres.

Muhammad, Suwarsono. 2012. *Strategi Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.

Musfar, Tengku Firli. 2012. *Strategi Pemasaran*. Pekanbaru: Unri Press.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintah Baru) I*. Jakarta : Bumi Aksara.

Rasyid, M. Ryass. 2000. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: PT Buku Seru.

Siagian, Sondang P. 2018. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. 2017. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiaserana Indonesia.

Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Ombak.

DOKUMEN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.

PKPU No. 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Tambahan Lembaran Negara RI, Penjelasan tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.

DOKUMEN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana Strategis (RenStra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Kepala Desa tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2017

Rencana Kerja tahun 2017

Rencana Kerja tahun 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

INTERNET

<https://www.linguitikid.com/2016/09/penelitian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1> diakses hari minggu jam 14:13 WIB.

JURNAL

Adlin, Januardi. 2017. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkades Serentak Di Desa Balam*

Jaya Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar Tahun 2015.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Universitas Riau

Musfiroh, Tadkiroatun. *Hakikat Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligences)*.

Patta, Abd. Kadir. 2009. *Masalah Dan Prospek Demokrasi*. Jurnal *Academica Fisip Untad* Vol. I 2009

Setyadi, Dery. 2017. *Startegi Koalisi Partai Terhadap Pemenangan Pasangan Haris-Zardewan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.

Sulaeman, Affan. 2015. *Demokrasi, partai politik, Dan pemilihan kepala daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.1 No.1, April 2015.

MODUL

Hamid, Djahmur. *Konsep Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*.

Zainuri, Mohamad, Mahfayeri, dkk. 2017. *Konsepsi Integritas*. Modul Diseminasi Gugus Depan Integritas.

MEDIA ONLINE

Halloriau.com. *Jelang Helat Pesta Demokrasi Tingkatkan Pendidikan Politik, Kesbangpol Wujudkan Pemilih yang Cerdas di Kabupaten Bengkalis*. Kamis, 19/04/2018 - 15:16:31 WIB
<http://www.halloriau.com/read-bengkalis-102138-2018-04-19-tingkatkan-pendidikan-politik-kesbangpol-wujudkan-pemilih-yang-cerdas-di-kabupaten-bengkalis.html>

Riaugreen.com *Kesbangpol Bengkalis Akan Menjadi Instansi vertikal, dan Seajar Dengan Forkompimda*. Senin, 25 April 2016- 11:49 WIB
Riaugreen.com/view/Bengkalis/17437/Kesbangpol-Bengkalis-Akan-Menjadi-Instansi-Vertikal-dan-Seajar-Dengan-Forkompimda.html#XJnL6hgxDZ

SKRIPSI

Lesatri, Dina. 2018. *Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.

Febriyan, Friski. 2016. *Upaya Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Kota Pekanbaru Sebagai Perwujudan Visi dan Misi Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.

Misya, M. Viqy Saputra. 2016. *Upaya Pemerintahan Daerah Ddalam Meningkatkan Pendidikan di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2014*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.

TESIS

Wibowo, Rangga Giri. 2017. *Manajemen program kerja badan kesatuan bangsa dan Politik kabupaten lampung selatan dalam mendukung Visi misi tahun 2016*. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.